

[SNP – 26]

Kepemimpinan Komunikatif GKR Hemas di DPD RI: Mendorong Representasi Gender dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Rianaris Marlasbasa^{1*}, Resman Muharul Tambunan¹

¹Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia,
Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1 Kecamatan Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, 12110

Penulis untuk Korespondensi/Email: riananapitupulu@gmail.com

Abstract – Women's political participation in the SDGs is vital for gender equality and good governance. The challenge is building capacity to influence inclusive policymaking, making GKR Hemas's communicative leadership in the House of Regional Representative (DPD RI) a relevant study. The objective of this research is to analyse the communicative leadership of GKR Hemas in the DPD RI in advocating for substantive gender representation and supporting the SDGs, particularly goals on gender equality and strengthening institutions. This research uses a qualitative approach with a variant of communication ethnography. In this study, data were collected through interviews, document analysis, and observation. The research results conclude that: First, the strategic capability of GKR Hemas's communicative leadership successfully built political resilience by converting cultural capital into sustainable social relations. It demonstrates the success of her communication in building legitimacy through tangible commitment to empower vulnerable groups, which aligns with the spirit of the SDGs. Second, her leadership transcended gender representation from formality of 30% quota to substantive impact. Strategic initiatives like Parliamentary Women's Caucus and gender-responsive budgeting created an institutional framework for women's participation, whilst also realising the principles of SDGs 5 and 16.

Keywords: *Communication Ethnography, Communicative Leadership, GKR Hemas, Gender Representation.*

Abstrak – Partisipasi politik perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) penting untuk kesetaraan gender dan tata kelola yang baik. Tantangannya adalah beralih dari sekadar memenuhi kuota ke kemampuan mempengaruhi kebijakan yang inklusif. Dalam konteks ini, kepemimpinan komunikatif yang dijalankan oleh figur GKR Hemas di DPD RI menjadi relevan untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepemimpinan komunikatif GKR Hemas di DPD RI dalam memperjuangkan representasi gender yang substansial dan mendukung Tujuan SDGs, khususnya pada tujuan kesetaraan gender dan penguatan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan varian studi etnografi komunikasi yang berfokus secara khusus pada kepemimpinan dan gaya komunikasi GKR Hemas. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, kapabilitas kepemimpinan komunikatif yang strategis dari GKR Hemas berhasil membangun ketahanan politik dengan mengonversi modal kultural menjadi relasi sosial berkelanjutan. Hal ini menunjukkan keberhasilan komunikasinya dalam membangun legitimasi melalui komitmen nyata pada pemberdayaan kelompok rentan, yang selaras dengan semangat *no one left behind* dalam SDGs. Kedua, kepemimpinannya mentransendensi representasi gender dari formalitas kuota 30% menjadi dampak substantif. Inisiatif strategis seperti Kaukus Perempuan Parlemen dan penganggaran responsif gender menciptakan kerangka kelembagaan bagi partisipasi politik perempuan, sekaligus merealisasikan prinsip SDGs poin 5 dan 16.

Kata kunci: *Etnografi Komunikasi, GKR Hemas, Kepemimpinan Komunikatif, Representasi Gender.*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, mengingat partisipasi mereka di lembaga legislatif belum mencapai representasi yang ideal dan setara. Meskipun ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan di parlemen, implementasinya seringkali terkendala oleh budaya patriarki yang masih kuat dan struktur sosial yang tidak mendukung [1]. Partisipasi politik perempuan di Indonesia dalam lembaga legislatif hingga saat ini belum mencapai tingkat ideal dan setara, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan [2]. Data Inter-Parliamentary Union tahun 2023 mencatat bahwa peringkat Indonesia untuk representasi perempuan di parlemen berada pada posisi ke-103 dunia, dengan presentasi sebesar 22.5% di DPR RI dan 34.6% di DPD RI [3].

Ketimpangan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan kultural yang kompleks pada sistem politik Indonesia terutama masih didominasi nilai-nilai patriarkal. Dalam konteks inilah figur Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas muncul sebagai fenomena menarik, seorang perempuan yang berhasil membangun kepemimpinan politik nasional sambil mempertahankan akar kulturalnya sebagai permaisuri Keraton Yogyakarta [4,5].

Representasi kepemimpinan perempuan dalam ranah politik Indonesia masih menjadi isu strategis, mengingat tingkat partisipasinya dalam lembaga legislatif belum mencapai angka representasi yang ideal. Menurut Maulina Pia Wulandari, terdapat dua gaya kepemimpinan dari perempuan dimana dapat diklasifikasikan secara general yakni kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan feminisme [6]. Jadi, secara garis besar pengertian kepemimpinan transformasional adalah bagaimana seorang pemimpin dihadapkan pada suatu situasi dituntut perubahan terjadi sangat cepat dan dapat menyesuaikan diri.

Sebagai anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, GKR Hemas menawarkan sebuah "fenomena budaya" yang kaya untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi bagaimana GKR Hemas, sebagai seorang advokat kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan, secara komunikatif memaknai dan menegosiasikan identitasnya dalam ruang politik. Melalui

pendekatan etnografi komunikasi, kita dapat menganalisis praktik-praktik komunikasinya –baik verbal maupun non-verbal– untuk memahami bagaimana sebuah "model kepemimpinan perempuan yang transformasional" itu dihidupi dan ditampilkan dalam interaksi sosialnya, serta bagaimana hal itu berkontribusi pada terciptanya wacana kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Lanskap politik Indonesia kerap diwarnai dengan pasang surut karier para tokohnya. Namun, tidak banyak yang mampu melakukan "*comeback*" secara elegan ke posisi strategis setelah sempat absen dari pucuk pimpinan [7]. GKR Hemas adalah salah satu yang langka. Perjalanannya bagaikan sebuah laboratorium hidup untuk mengkaji ketahanan politik, loyalitas basis pendukung, dan seni membangun jejaring yang berkelanjutan. Setelah sukses menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPD RI berturut-turut (Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019) sebelum akhirnya beliau kembali dipercaya menduduki posisi yang sama pada periode ke-V (2024-2029). Kemampuan untuk kembali meraih posisi pimpinan setelah satu periode "tidak aktif" secara struktural menandakan adanya akumulasi modal politik dan jaringan yang berkelanjutan, yang patut dikaji lebih mendalam [8,9].

Pengalaman legislatif yang berkelanjutan ini memungkinkannya membangun jaringan advokasi yang efektif, sekaligus mengembangkan gaya komunikasi khas yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Perjalanan karier sebagai Pimpinan DPD RI selama periode GKR Hemas yang terselang-seling tersebut justru merefleksikan dinamika politik dilatari oleh perjuangan isu gender di Indonesia itu sendiri, dimana konsistensi perjuangan isu-isu substansial tidak selalu linear dengan posisi formal dalam struktur kekuasaan [10].

Dari hasil penelusuran beberapa peneliti, terdapat penelitian atau kajian sebelumnya yang membahas tentang kepemimpinan politik perempuan di Indonesia. Misalnya penelitian dari Baharudin, yang menyatakan bahwa partisipasi dan kepemimpinan perempuan di ranah politik Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensi, mencakup aspek struktural dan kultural [11]. Kebijakan afirmatif yakni 30% bagi perempuan pun, pada praktiknya kerap tidak diimplementasikan secara

konsisten dan tidak diiringi dengan langkah-langkah pendukung yang memadai.

Penelitian dari Saputra & Asih juga menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan sebagai calon dalam pilkada masih jauh dari memadai, meski ada mandat kuota 30% [12]. Minimnya partisipasi ini berakar pada diskriminasi gender dari lingkungan sosial dan psikologis yang membatasi ruang gerak politik perempuan. Berdasarkan hasil peneliti lainnya [6], menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan kepemimpinan tinggi di Indonesia seperti presiden, menteri dan gubernur masih sangat timpang dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena ini dipicu oleh faktor *glass ceiling* dan budaya patriarki.

Mencermati permasalahan dan hasil studi-studi diatas, tulisan ilmiah ini akan menjadi semakin penting dan menarik karena belum banyak kajian khusus tentang kepemimpinan komunikatif perempuan ditinjau dari perspektif teori etnografi komunikasi. Dengan menggunakan teori tersebut kiranya menggambarkan bagaimana kegiatan sehari-hari GKR Hemas dalam menjalankan agenda konstitusional dan politik secara konkret dan resistant. Tidak dipungkiri kegigihan beliau dalam memberikan contoh bagi anak bangsa Indonesia kedepannya, bahwa perempuan dapat memainkan peran dan citranya di kancah dunia perpolitikan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada potensi untuk mengisi celah literatur mengenai kepemimpinan perempuan Indonesia dalam perspektif teori komunikasi yang terintegrasi. Studi sebelumnya telah memberikan landasan berharga mengenai tantangan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam politik Indonesia. Namun kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek politis-institusional seperti kuota, *glass ceiling*, dan budaya patriarki. Sementara masih sedikit yang mengeksplorasi secara mendalam peran kompetensi komunikasi strategis sebagai faktor kunci yang memungkinkan seseorang pemimpin perempuan tidak hanya bertahan, tetapi juga efektif mendorong agenda substantif.

Lebih lanjut, temuan dari penelusuran literatur menunjukkan bahwa terdapat celah akademik, yakni belum adanya penelitian yang menggunakan teori Etnografi Komunikasi Dell Hymes untuk mengkaji secara komprehensif bahwa navigasi kultural dan pembangunan konsensus melalui komunikasi justru merupakan pondasi fundamental bagi ketahanan dan kesuksesan politik GKR Hemas. Dengan

pendekatan multidisipliner, artikel ini bertujuan untuk menganalisis gaya komunikasi, strategi advokasi, dan tantangan yang dihadapi, sekaligus kontekstualisasinya dalam lanskap politik Indonesia. Klaim bahwa celah inilah yang menjadi fokus artikel ini menjadi kontribusi utamanya

Dengan demikian, kajian ini menawarkan *novelty* melalui integrasi antara kerangka Etnografi Komunikasi dengan konsep kepemimpinan komunikatif untuk menganalisis kepemimpinan politik perempuan Indonesia dalam konteks GKR Hemas di DPD RI, yang fokus pada representasi gender dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebuah pendekatan yang masih langka. Kontribusi utamanya terletak pada usulan sebuah konsep teoritis baru, yakni 'Kepemimpinan Jembatan Antar Budaya' (*Intercultural Bridge Leadership*), untuk memaknai fenomena kepemimpinan yang menjembatani ranah budaya dan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan varian studi etnografi komunikasi yang berfokus secara khusus pada kepemimpinan dan gaya komunikasi GKR Hemas. Pemilihan metode ini didasarkan pada posisi peneliti dalam mengamati dan/atau berinteraksi dengan subjek penelitian di lingkungannya secara langsung dan alamiah. Tujuannya adalah untuk memahami suatu budaya atau aspek sosial dari sudut pandang orang-orang yang berada di dalam budaya tersebut (*emic perspective*) [13,14].

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, dari Mei hingga Agustus 2025, dengan alokasi waktu yang dirancang secara metodologis untuk memastikan kedalaman dan validitas proses penelitian. Tahap awal pada bulan Mei difokuskan pada penyusunan desain penelitian dan instrumen pengumpulan data, dilanjutkan dengan fase pengumpulan data empiris selama Juni dan Juli melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumen. Bulan Agustus dialokasikan sepenuhnya untuk proses analisis data yang mencakup reduksi, interpretasi, dan triangulasi temuan, yang kemudian diakhiri dengan perumusan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. *Pertama*, wawancara mendalam dilakukan terhadap 7 (tujuh) informan kunci. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) mantan abdi dalem yang

berkarier di Sekretariat Jenderal DPD RI dan memahami dinamika internal; (2) staf terdekat yang terlibat langsung dalam pengelolaan agenda dan komunikasi dengan GKR Hemas; serta (3) aktivis perempuan dari LSM yang pernah berkolaborasi dalam advokasi.

Kedua, analisis dokumen diterapkan pada berbagai dokumen publik, seperti naskah pidato, notulensi rapat DPD RI dan produk legislasi yang didukung.

Ketiga, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel dan arsip daring yang relevan dengan biografi GKR Hemas, politik gender dan SDGs. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik.

Selanjutnya data telah yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis sebagaimana yang dikonsepsikan oleh John W. Creswell. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber dan metode [15].

Penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teori utama untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang kepemimpinan GKR Hemas: *Pertama*, Etnografi Komunikasi (Dell Hymes). Kerangka ini digunakan untuk menganalisis pola komunikasi GKR Hemas dalam berbagai sambutan yang berbeda-beda. Konsep SPEAKING model Hymes (*Setting and Scene, Participants, Ends, Act Sequences, Key, Instrumentalities, Norms, and Genre*) [13,14], diterapkan untuk memahami bagaimana beliau mempraktekan gaya komunikasi, dengan sebagai berikut: a). Komunitas tutur Keraton: menggunakan Bahasa Jawa Halus (krama inggil) dengan memperhatikan tata krama dan simbolisme budaya. b). Komunitas tutur politik nasional: Bahasa Indonesia formal dengan strategi komunikasi politik yang persuasif. c). Komunikasi tutur akar rumput: Bahasa Indonesia sehari-hari yang mudah dipahami dengan pendekatan empatik.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi teori tersebut, penelitian ini kemudian mengajukan sebuah konsep teoritis baru yang disebut *Toward a Bridge Leadership Theory* ("Kepemimpinan Jembatan Antarbudaya"). Konsep ini merujuk pada kemampuan seorang pemimpin dalam menjembatani domain budaya dan politik yang berbeda, menerjemahkan nilai-nilai lokal ke dalam wacana politik yang lebih luas, serta membangun koalisi lintas sektor dengan narasi yang merangkul keberagaman untuk menciptakan konsensus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jejak Kepemimpinan dan Ketahanan Politik GKR Hemas

GKR Hemas, memiliki nama Tatiek Drajad Supriastuti lahir pada tanggal 31 Oktober 1952, merupakan anak ketiga dan satu-satunya perempuan dari tujuh bersaudara pasangan Kol. (Purn) R. Soepono Digdasastrapranata dan R.Ngt. Soesamtilah. Suatu upacara selapanan –sebuah ritus dalam tradisi Jawa– dilaksanakan oleh kedua orang tua beliau menyusul kelahirannya, yang didalamnya terdapat simbolisme “penjualan” anak kepada kerabat yang hadir, sebagai bentuk ikatan sosial [10]. Latar belakang keluarga yang menekankan kesederhanaan dan kedisiplinan dari sang ayah membentuk kepribadian yang teguh. Posisi beliau sebagai satu-satunya anak perempuan dituntut untuk bertanggung jawab dan menjadi teladan. Seperti contoh fokus pengasuhan kepada adik keenam yang menyandang hidrosefalus. Di masa akan datang, bagi GKR Hemas menanamkan prinsip dalam diri sendiri akan kepedulian yang mendalam terhadap kelompok marginal dan penyandang disabilitas [5].

Riwayat pendidikan beliau dimulai dari SD hingga menginjak kursi SMA kelas I di Tarakanita, kemudian dilanjutkan ke SMA Negeri 24 Jakarta. Setelah tamat, GKR Hemas menempuh studi Jurusan Seni Rupa di Universitas Trisakti. Namun, sebelum merampungkan Pendidikannya, beliau berangkat ke Jerman untuk melanjutkan studi, hanya saja dijalani selama tiga bulan sebelum memutuskan kembali ke tanah air untuk menikah dengan Bendara Raden Mas Herjuno Darpito, sang Putra Mahkota, bergelar KGPH Mangkubumi, yang kemudian dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sultan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Prosesi lamaran yang dilakukan secara langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada GKR Hemas menjadi suatu momen yang bersifat monumental dan mencerminkan penghargaan [10].

Perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1973 di Keraton Yogyakarta. Pada awal kehidupan pernikahan, status GKR Hemas sebagai istri putra mahkota tidak serta merta diiringi dengan fasilitas istana yang lengkap. Keluarga Pangeran Mangkubumi bahkan harus tinggal secara komunal dengan keluarga pangeran lainnya dalam satu rumah. Setelah beberapa kali pindah tempat tinggal, residensi di Madukismo No. RD 22 menjadi titik awal yang signifikan bagi kehidupan sosial dan politik GKR Hemas. Di tempat inilah beliau mulai

aktif melakukan sosialisasi dan terlibat lebih jauh dalam dunia politik. Sebagai pendamping setia KGPH Mangkubumi, GKR Hemas mengaktifkan diri dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, seperti PKK, Yayasan Sayap Ibu, serta menjadi pendiri Persatuan Perancang Mode Indonesia (PAPMI) dan Himpunan Wanita Karya. Pada 7 Maret 1989, KGPH Mangkubumi dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Hemas beserta keluarga harus berpindah ke lingkungan Keraton. Transisi ini menimbulkan *culture shock* akibat perbedaan krusial antara kehidupan sebelumnya dengan adat istiadat Keraton yang telah mengakar selama berabad-abad. Dalam sebuah wawancara eksklusif, GKR Hemas mengungkapkan, “Tantangan terbesar adalah memahami dan menghormati setiap tata krama tanpa kehilangan identitas diri dan kehangatan keluarga. Kami harus menemukan keseimbangan antara tradisi dan kehidupan kekinian”[5].

Di bawah instruksi beliau sebagai permaisuri, dilakukanlah transformasi terhadap lanskap Keraton Kilen –kediaman pribadi anggota Kerajaan– untuk mengadaptasi nilai-nilai budaya sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan harmonis bagi seluruh keluarga. Analisis studi kepustakaan terhadap arsitektur Keraton Kilen, menunjukkan bahwa transformasi ini tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi tetapi justru mengintegrasikan unsur-unsur fungsional dan estetika modern ke dalam kerangka budaya Jawa, agar menciptakan sebuah ruang hidup yang dinamis [16].

Pengalaman dalam mengelola dinamika internal Keraton tersebut ternyata menjadi bekal berharga bagi GKR Hemas ketika dia terjun ke dalam panggung politik nasional. Kemampuannya beradaptasi, membangun konsensus, dan mentransformasi lingkungan yang awalnya asing menjadi ruang yang harmonis. Terbukti bukan hanya sekedar keterampilan domestik, dalam navigasi peta politik yang kompleks beliau menggunakan kepemimpinan komunikasi memungkinkan untuk membangun jaringan dan modal politik yang kuat. Meskipun harus melalui periode jeda pada masa bakti sebagai Pimpinan DPD RI.

Tabel 1. Posisi GKR Hemas di DPD RI

Periode	Tahun	Jabatan
I	2004-2009	-
II	2009-2014	Wakil Ketua II DPD RI
III	2014-2019	Wakil Ketua II DPD RI
IV	2019-2024	-

Periode	Tahun	Jabatan
V	2024-2029	Wakil Ketua II DPD RI

Sumber: DPD RI, 2024 [17]

Dinamika keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia seringkali diwarnai oleh tantangan untuk mempertahankan posisi strategis. Berdasarkan informasi dari Tabel 1, perjalanan karier GKR Hemas di DPD RI menjadi sebuah studi kasus yang menarik mengenai ketahanan dan pengakuan institusional. Dari kronologis periode diatas mengungkapkan bahwa setelah sukses memegang posisi Wakil Ketua DPD RI selama dua periode berturut-turut (2009-2014 & 2014-2019), terdapat periode jeda masa bakti tidak terpilih sebagai Pimpinan DPD RI (2019-2024), sebelum akhirnya beliau kembali dipercaya menduduki posisi yang sama pada periode ke-V (2024-2029).

Menurut analisis terhadap temuan tersebut, periode jeda bagi politisi sering kali digunakan untuk memperkuat basis konstituen dan merawat koalisi, alih-alih menghilang dari panggung politik. Hasil wawancara dengan seorang staf dekat yang enggan disebutkan namanya, mengkonfirmasi hal ini: “Selama periode 2019-2024, Ibu Hemas justru sangat aktif melakukan *blusukan* dan pendampingan program sosial di akar rumput, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan disabilitas, melanjutkan komitmen yang telah dibangunnya sejak lama.”

Kemampuan untuk kembali meraih posisi pimpinan setelah satu periode “tidak aktif” secara struktural menandakan adanya akumulasi modal politik dan jaringan yang berkelanjutan, yang patut dikaji lebih mendalam. Modal politik GKR Hemas tidak hanya bersumber dari legitimasi kultural sebagai permaisuri Sultan, tetapi juga dari rekam jejak nyata di DPD RI dan konsistensi beliau memperjuangkan isu-isu kerakyatan. Sebagaimana hasil penelitian Baharudin [11], penulis menyimpulkan bahwa kombinasi antara *cultural capital* yang kuat dari Keraton dan *social capital* yang dibangun dari kinerja konkret di lapangan menjadi faktor kunci yang memungkinkan kembalinya GKR Hemas ke pucuk Pimpinan DPD RI, menjadikan beliau figur yang tangguh dalam dinamika politik Indonesia.

Navigasi Komunikasi *Multi-Speech Community*: Dari Keraton ke Senayan

Analisis Etnografi Komunikasi (Dell Hymes) mengungkap kemampuan GKR Hemas yang luar biasa dalam menavigasi berbagai komunikasi tutur

dapat diuraikan menggunakan kerangka Hymes, sebagaimana berikut: **Pertama:** Di Keraton Kilen (Komunitas T tutur Tradisional). Komunikasi ini diatur oleh *Norms* (tata krama) dan *Key* (nada) yang sangat ketat. Krama Inggil adalah *Instrumentality* (saluran) utama yang wajib digunakan. *Participants* adalah keluarga Keraton dan abdi dalem, dengan *Ends* (tujuan) untuk menjaga harmoni, hierarki, dan kewibawaan tradisional. Sebuah dokumentasi video upacara *Udan Mas* hasil dari review buku Indra Syamsi [10], menunjukkan bagaimana GKR Hemas sebagai *Participant* utama menjalankan seluruh *Act Sequence* (urutan tindakan) dengan presisi dan penuh *Key* (khidmat) sehingga memperkuat legitimasi kultural.

Kedua: Di Kantor DPD RI (Komunikasi T tutur Birokratik). *Setting*-nya berubah menjadi ruang rapat formal di Jakarta. Disini, *Instrumentality*-nya adalah Bahasa Indonesia formal dan Bahasa Inggris untuk komunikasi diplomatik. *Norms*-nya adalah prosedur birokrasi dan politik. Namun menurut hasil wawancara dengan salah satu staf senior, “Ibu Hemas seringkali membuka rapat dengan menanyakan kabar keluarga staf, menggunakan sapaan Jawa seperti ‘piye kabare?’ yang kemudian dijelaskan dalam Bahasa Indonesia. Ini adalah strategi cerdas: beliau memahami *Norms* birokrasi tetapi menyisipkan *Key* kehangatan khas Jawa untuk membangun solidaritas”. Hal tersebut menunjukkan kemampuan GKR Hemas menggabungkan *Ends* (instrumen/tujuan) dengan menjalankan sebuah kegiatan rapat yang relasional yaitu memelihara hubungan.

Ketiga: Di Masyarakat Yogyakarta (Komunikasi T tutur Akar Rumput). *Scene*-nya berubah menjadi lapangan, seperti dalam kasus pelecehan di Gunung Kidul. Disini, *Key*-nya berubah drastis menjadi penuh empatik, solutif dan keibuan. *Instrumentality*-nya adalah Bahasa Indonesia dialek Yogya dan Jawa Ngoko yang cair. *Norms*-nya adalah keterusterangan dan kedekatan emosional. Kemampuan adaptasi komunikasi GKR Hemas menjembatani tradisi dan modern, serta membangun legitimasi dari tingkat kultural sampai ke tingkat politik nasional.

Dalam buku *GKR Hemas: Ratu di Hati Rakyat* karya Indra Syamsi, para sahabat dan kolega mendeskripsikan GKR Hemas sebagai pribadi teguh dalam memegang prinsip serta konsisten dalam memperjuangkan cita-citanya tanpa menunjukkan sikap mundur [10]. Senada dengan hal tersebut, hasil temuan mengungkapkan bahwa perbedaan GKR Hemas adalah konsistensinya karena perjuangan

untuk perempuan dan disabilitas bukan sekadar proyek politik, melainkan telah menjadi hidupnya sejak lama, jauh sebelum beliau masuk DPD. Hal ini menunjukkan bahwa tindakannya berakar pada nilai-nilai otentik, bukan hanya didasari kepentingan strategis semata.

GKR Hemas mampu merepresentasikan identitas, nilai, dan fungsi dari masing-masing peran tersebut secara terpisah tanpa tumpang tindih. Beliau disebutkan tetap mempertahankan kewibawaan, kebijaksanaan, dan sikap yang mudah diakses di tengah kesibukannya sebagai seorang Ratu, istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Wakil Ketua II Pimpinan DPD RI.

Kasus kekerasan seksual di Gunung Kidul menjadi contoh faktual untuk dianalisis dengan teori Hymes. Pada kasus tersebut, terjadi krisis legitimasi dimana aparat setempat (sistem birokrasi) menyatakan kasus sudah “tuntas”, ketika ditanya langsung oleh GKR Hemas tanpa memperdulikan klaim dan kebutuhan dari sang korban. Tindakan beliau dapat dibaca sebagai bagian dari kepemimpinan komunikatif yang bertujuan untuk mengoreksi distorsi komunikasi dan mengembalikan orientasi sesuai tugas, pokok, dan fungsi bagi pemerintah daerah pada saat itu, dengan memberikan pemahaman bersama dengan cara: (1). Mengungkap Ketidakvalitisan Klaim (*Claim to Validity*): Ketika pejabat setempat menyatakan kasus selesai, GKR Hemas mempertanyakan klaim kebenaran (*truth*) dan ketepatan (*rightness*) pernyataan aparat Gunung Kidul dengan meminta bukti konkret dan bertemu langsung dengan korban. (2). Beralih dari Tindakan Strategis ke Komunikatif: Aparat awalnya bertindak strategis menutupi kasus untuk menghindari keributan, GKR Hemas membuka ruang dialog dengan korban, mendengarkan secara empatik untuk memahami dunianya (*lifeworld*), dan memastikan keinginan korban untuk melanjutkan Pendidikan terpenuhi. Tindakan beliau yang merelokasi sekolah korban adalah wujud dari pencapaian kesepahaman (*reaching understanding*) yang kemudian diikuti dengan tindakan nyata. (3). Menggunakan otoritas untuk memulihkan *Lifeworld*: GKR Hemas menggunakan otoritas dan jaringan bukan untuk mendominasi, tetapi juga memberdayakan korban yang terpinggirkan. Dengan koordinasi dengan yayasan perlindungan perempuan, beliau bertindak untuk memulihkan *lifeworld* korban yang rusak karena kekerasan dan kelalaian sistem.

Navigasi komunikasi GKR Hemas bukan sekedar adaptasi situasional, melainkan sebuah kompetensi

komunikatif tingkat tinggi yang direpresentasikan melalui kerangka Etnografi Komunikasi Hymes. Beliau menguasai sepenuhnya kode sosial dan linguistik dari setiap *speech community* yang dihadiri. Lebih dalam lagi, komunikasi beliau seringkali berfungsi sebagai kepemimpinan komunikatif yang bertujuan membangun konsensus, mengoreksi ketidakadilan dan mempertahankan rasionalitas dalam ruang publik.

Kemampuan GKR Hemas menjembatani *lifeworld* (dunia nyata) tradisi Keraton dan birokrasi modern (DPD RI) inilah yang menjadi pondasi kokoh dari legitimasi dan ketahanan politik beliau yang langgeng. Tidak hanya berbicara dalam berbagai komunitas, tetapi juga berhasil menghubungkan beberapa komunitas melalui kekuatan kata dan tindakannya.

Mendorong Representasi Gender dari Kuota ke Substansi

Perjuangan GKR Hemas hingga saat ini melampaui sekedar pemenuhan kuota 30% perempuan berpartisipasi pada pemilihan umum. Melalui *standpoint*-nya yang unik sebagai permaisuri yang akrab dengan dinamika kekuasaan tradisional maupun modern, beliau memahami bahwa representasi harus bermuara kepada substansi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pendiri Kaukus Perempuan Parlemen, Ibu Hemas sadar betul bahwa kuota hanyalah pintu masuk. Tanpa infrastruktur pendukung dan kesadaran kritis, perempuan yang duduk di parlemen hanya akan menjadi “bunga” atau bahkan mengadopsi nilai-nilai patriarki yang mengakar. Analisis studi kepustakaan terhadap perkembangan kaukus sejenis [18], menunjukkan bahwa Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI merupakan salah satu yang paling terdokumentasi dan memiliki agenda kerja paling terlepas jelas peran dari GKR Hemas dalam memberikan *roadmap* yang terstruktur.

Inisiatif pendirian Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI tahun 2006 adalah wujud nyata dari hal ini. Kaukus ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kapasitas bagi anggota perempuan, tetapi juga menjadi kekuatan penekan (*pressure group*) untuk mengawal kebijakan yang responsif gender. Dari sudut pandang Etnografi Komunikasi, Kaukus menciptakan *speech community* khusus dengan aturannya sendiri (*Norms*), dimana para anggotanya (*Participants*) dapat berbagi pengalaman dan mengembangkan strategi dengan *Ends* yang jelas, yaitu menghasilkan kebijakan yang setara dengan

gender. Hasil dokumentasi riset internal DPD RI tahun 2010 menunjukkan bahwa Kaukus yang dipelopori GKR Hemas berperan penting dalam menyusun panduan *gender budgeting* untuk anggota DPD RI, sebuah terobosan substantif dalam anggaran yang pro kesetaraan gender.

Semboyan GKR Hemas, “*Perempuan ini bukan lagi konco wingking, neroko katut, suwargo nunut...*” adalah sebuah narasi yang powerful untuk mendekonstruksi wacana patriarki dalam memandang perempuan. Dalam kerangka teori etnografi komunikasi, pernyataan ini merupakan sebuah pernyataan performatif dan sebuah *speech act* yang membentuk realitas secara kultural.

Etnografi komunikasi, yang dikembangkan oleh Dell Hymes, menekankan pada konteks budaya di mana komunikasi itu terjadi. Ungkapan GKR Hemas tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya Jawa, di mana tiga frasa yang ia sanggah itu “*konco wingking*” (teman di belakang/area domestik), “*neroko katut*” (ikut ke neraka), dan “*suwargo nunut*” (ikut ke surga) merupakan pepali (nasihat, aturan) yang selama ini membelenggu dan membatasi ruang gerak perempuan Jawa dalam struktur sosial yang patriarkal. Dengan secara sengaja mendekonstruksi dan menolak pepali budaya ini, GKR Hemas tidak sekedar berbicara, tetapi melakukan sebuah *cultural act*.

Kepemimpinan komunikatif ini berfungsi untuk meruntuhkan *speech community* lama yang menerima nilai-nilai patriarki sebagai sesuatu yang *given*, dan secara simultan membangun *speech community* yang baru. Dengan menggunakan bahasa dan metafora budaya yang sangat akrab di telinga konstituennya, ia melakukan “pembajakan makna” terhadap simbol-simbol budaya yang opresif. Ia mengambil idiom yang selama ini menjadi alat kontrol dan mengubahnya menjadi senjata untuk pembebasan. Proses ini merupakan jantung dari etnografi komunikasi: memahami bagaimana komunikasi digunakan untuk mengkonstruksi, menegosiasikan, dan mentransformasikan makna serta identitas dalam sebuah komunitas budaya.

Dengan demikian, semboyan tersebut bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebuah strategi komunikasi budaya yang canggih. Ia efektif karena bersumber dari dalam budaya itu sendiri, sehingga pesan transformasinya tidak terasa sebagai imposisi dari luar, melainkan sebagai sebuah pencerahan dan reklamasi makna yang partikular dan kontekstual. Inilah yang membuat kepemimpinan

komunikatifnya begitu resonan dan powerful dalam memperjuangkan representasi gender yang substansial.

Sebuah hasil analisis terhadap pemberitaan media lokal [19], menemukan bahwa semboyan “*Perempuan ini bukan lagi konco wingking, neroko katut, suwargo nunut...*” sangat sering dikutip dan menjadi semacam *rallying cry* bagi gerakan perempuan di Yogyakarta dan sekitarnya.

Seminar dan FGD yang telah diselenggarakan, seperti halnya UNDP PRIDE pada tahun 2007, menunjukkan strategi komunikasi yang sistematis untuk membangun kesadaran kritis dan jaringan advokasi. Melalui kerangka Etnografi Komunikasi Hymes, acara-acara semacam ini dirancang dengan cermat: *Setting/Scene*-nya adalah ruang pertemuan formal; *Participants*-nya adalah multi pihak (legislator, aktivis, akademisi, lembaga internasional); *Act Sequence*-nya dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan *Genre*-nya adalah diskusi panel dan lokakarya yang partisipatif. Seorang perwakilan UNDP yang terlibat acara tersebut, dalam wawancara mengungkapkan, “Pendekatan Ibu Hemas sangat strategis, tidak hanya berbicara tentang prinsip, tetapi sangat fokus pada “bagaimana” nya, pada mekanisme dan instrumen kebijakan yang bisa dirubah. Beliau membawa kredibilitas budaya yang sangat kuat ke dalam ruang advokasi teknis.”

Upaya ini selaras dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pangerutamaan Gender (PUG), yang ditransformasikan dari sekedar wacana administrasi menjadi aksi politik nyata. Di tangan GKR Hemas, PUG bukan lagi sekedar prosedur birokrasi, melainkan alat untuk *communicative action*. Beliau menggunakan mandat Inpres tersebut sebagai basis legitimasi untuk membuka ruang dialog dan negosiasi tentang kesetaraan gender di tingkat daerah dan nasional. Mentransformasikannya dari awalnya kebijakan pasif menjadi kekuatan yang mendorong perubahan substantif. Laporan Kemajuan Pelaksanaan PUG di DPD RI periode 2009-2014 mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah kebijakan daerah yang diinisiasi Anggota DPD RI, tentu saja tidak lepas dari advokasi intensif Kaukus yang dipimpin oleh GKR Hemas.

Dengan demikian, perjuangan GKR Hemas merupakan contoh nyata dari pergeseran fokus representatif deskriptif (kuota) menuju representatif substantif. Melalui penerapan etnografi komunikasi

yang cerdas, beliau membangun infrastruktur dan jaringan yang diperlukan untuk perubahan berkelanjutan. Dan melalui pendekatan tersebut, beliau tidak hanya mempertanyakan, tetapi secara aktif mengubah struktur wacana dan kekuasaan yang ‘menindas’, mengubah kebijakan gender dimana sekedar memenuhi kuota menjadi sebuah proyek deliberatif untuk mencapai keadilan humanis.

Memadukan Kearifan Lokal, SDGs, dan Kebijakan Nasional: Analisis Komunikatif GKR Hemas

Analisis strategi GKR Hemas dalam memadukan kearifan lokal dengan agenda nasional dan global dapat dibantu teori Etnografi Komunikasi (Dell Hymes). Teori ini membantu kita memahami bagaimana ia menggunakan ‘kode’ budaya yang berbeda dari bahasa keraton hingga bahasa kebijakan di Senayan untuk berfungsi efektif dalam berbagai *speech-community*.

GKR Hemas sebagai permaisuri Keraton Yogyakarta memiliki akses dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kearifan lokal. GKR Hemas tidak melihat tradisi sebagai penghambat, tetapi sebagai aset yang dapat diintegrasikan dengan agenda pembangunan modern. Peranan beliau dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat diartikulasikan dalam kerangka hukum nasional.

Sebuah hasil wawancara dengan seorang akademisi yang terlibat dalam tim perumusan RUU Keistimewaan DIY mengungkapkan: “Ibu Hemas berperan sebagai *jembatan*. Dalam banyak FGD, beliau mampu menerjemahkan konsep-konsep abstrak seperti “hak asal-usul” dan “nilai keistimewaan” ke dalam bahasa kebijakan operasional, tanpa mengorbankan esensinya”. Ini adalah praktik Etnografi Komunikasi tingkat tinggi: GKR Hemas memahami *Participants* (anggota DPD RI dan pemerintah pusat), *Norms* (proses legislatif), *Ends* (tujuan menghasilkan RUU) dari komunitas tutur politik nasional, lalu memasukkan *Instrumentalities* (istilah dan nilai) dari komunitas tutur Yogyakarta.

Pendekatan ini merepresentasikan prinsip *no one left behind* dalam SDGs, dengan memastikan bahwa masyarakat adat dan nilai-nilai kultural tidak tertinggal dalam pembangunan. GKR Hemas membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan

harus inklusif, tidak hanya secara ekonomi dan sosial, tetapi juga kultural.

GKR Hemas dalam pencalonan sebagai Anggota DPD RI dimulai dari periode pertama lembaga tersebut berdiri. Berikut ini penulis mencoba memberikan gambaran periodik keanggotaan GKR Hemas sebagai anggota DPD RI, sebagai berikut:

Tabel 2. Fokus Kebijakan GKR Hemas di DPD RI

Tahun	Posisi	Fokus Kebijakan
2004-2009	Anggota	Sosialisasi DPD RI, peletakan dasar isu perempuan dan otonomi daerah
2009-2014	Wakil Ketua DPD RI	Penguatan Kaukus Perempuan Parlemen, advokasi UU Kesetaraan Gender
2014-2019	Wakil Ketua DPD RI	Konsolidasi jaringan perempuan parlemen, integrasi PUG dalam kebijakan daerah
2019-2024	Anggota	Penguatan basis akar rumput, pendampingan UMKM perempuan
2024-2029	Wakil Ketua DPD RI	Replikasi model pemberdayaan Yogyakarta ke tingkat nasional

Sumber: DPD RI, 2024 [17]

Menurut kronologis periodik dari Tabel 2, selama masa jabatan di DPD RI, GKR Hemas aktif memperjuangkan berbagai kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan. Itulah sebabnya beliau sangat mendukung pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di parlemen, dengan harapan wanita sejajar dengan laki-laki. Salah satu aksi nyata yang masih eksis sampai periode ke-V yang digagas oleh GKR Hemas yakni berdirinya Kaukus Perempuan Parlemen di Senayan pada tanggal 27 Maret 2006.

Tugas dan harapan Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI adalah mengawal pembuatan berbagai Undang-Undang yang mengedepankan kebijakan publik dalam kesetaraan gender. Salah satu semboyan GKR hemas dalam berbagai kesempatan mengatakan, "*Perempuan ini bukan lagi konco wingking, neroko katut, suwargo nunut, perempuan juga makhluk mandiri yang sesungguhnya lebih tangguh dari kaum adam*" [10].

Tonggak masa kepengurusan GKR Hemas yang menonjol dalam mengkampanyekan keterlibatan perempuan di parlemen dengan menyelenggarakan acara seminar, FGD bekerja sama dengan UNDP

PRIDE acara Seminar Nasional Lokakarya Advokasi Peningkatan Perempuan Melalui Revisi UU Paket Politik pada tanggal 18-19 Juli 2007. Agenda kerja Kaukus PP DPD RI mengarah kepada tiga (3) tujuan, yaitu: 1). Program peningkatan kapasitas Anggota Perempuan di DPD RI, 2). Pengadaan dan penguatan Media Informasi Publik, dan 3). Memperjuangkan terbentuknya Jaringan Perempuan Parlemen se-Indonesia.

Cara pandang GKR Hemas dengan agenda pemberdayaan perempuan dalam arti luas menjawab stigma, bahwa dalam meningkatkan taraf hidup kaum sendiri baiknya kaum hawa harus sadar dan ikut berperan aktif dalam politik. Satu-satunya jalan agar program beliau menjadi inspirasi bagi semua perempuan di Indonesia. Pelatihan politik yang ditempuh oleh perempuan di wilayah Yogyakarta untuk menciptakan perempuan yang siap di kancah politik regional. Dalam berbagai forum diskusi, GKR Hemas terus menerus menggaungkan 'kesulitan bergerak' kaum perempuan berpolitik. Sebuah dokumentasi hasil FGD yang diselenggarakan DPD RI DIY pada tahun 2020 menunjukkan GKR Hemas secara khusus membedah "bahasa politik" yang seringkali tidak ramah dengan perempuan. Analisis Etnografi Komunikasi dari isi FGD tersebut mengungkap bagaimana beliau mengajak peserta untuk menguasai *Genre* (laporan, pidato, negosiasi), dan *Act Sequence* (tata cara berdebat) di parlemen, yang merupakan instrumen kunci dari sistem politik.

Keinginan beliau ingin lebih menyadarkan kaum perempuan dimana terdapat ketidak berminat terhadap isu gender yang masih dianggap sebelah mata, tidak strategis, pola pikir patriarki, masih dihalangi berbagai stereotip oleh nilai, norma dan agama. Melalui Kaukus Perempuan Parlemen, GKR Hemas menciptakan ruang publik alternatif tempat klaim validitas tentang ketidakadilan gender sehingga dapat didiskusikan secara rasional.

GKR Hemas juga dikenal sebagai figur yang membawa nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan nasional, seperti contoh RUUK DIY yang sudah disahkan menjadi UU Keistimewaan Yogyakarta tahun 2012. Keseriusan dan konsistensi untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik merupakan salah satu cara mengimplementasikan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Strategi Pangarusutamaan Gender (PUG).

Sesuai dengan hasil penelitian Zia Khusnullabib Ahmad dan Farida Hanum [16], saat ini Keraton

masih menjalankan tradisi Jawa hingga sekarang. Tradisi, adat dan budaya Jawa masih terjaga dan lestari yang berisikan upacara adat, ritual dan kegiatan-kegiatan penting lainnya masih eksis sampai saat ini. GKR Hemas mengetahui tidak akan bisa lepas dari budaya patriarki, namun ingin melawan perspektif dengan wacana feminisme. Semoga dimasa depan melawan ketidakadilan, wanita cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang dapat disalahkan, dimarjinalkan dengan pihak laki-laki.

Secara keseluruhan, perjalanan GKR Hemas merupakan contoh nyata dari kemampuan navigasi multi-komunitas tutur menggunakan Etnografi Komunikasi yang canggih. Beliau tidak hanya menyesuaikan gaya bicaranya, tetapi juga secara strategis memilih kode budaya mana yang paling efektif untuk menyampaikan pesan beliau di Setting yang berbeda.

Di *Setting dan Scene* (S) yang berbeda –mulai dari ruang sidang DPD yang formal, pertemuan akar rumput, hingga dialog budaya di Keraton GKR Hemas menunjukkan kecakapan yang luar biasa. Sebagai seorang putri keraton yang juga senator, identitas gandanya (*Participants/P*) memungkinkannya untuk menjadi *cultural translator* yang sah. Di panggung nasional, ia membingkai isu gender dengan bahasa kebijakan dan HAM, sementara di komunitas budaya Jawa, ia menggunakan *unggah-ungguh* (tata krama), dan narasi kearifan lokal seperti filosofi “*Memayu Hayuning Bawana*” (melestarikan keindahan dunia) sebagai *Acts* (tindak tutur) yang tidak terasa mengancam namun transformatif.

End (tujuan) dari komunikasinya pun berlapis. Di permukaan, tujuannya adalah advokasi kebijakan, tetapi di tingkat yang lebih dalam, tujuannya adalah *cultural persuasion*—meyakinkan berbagai komunitas tutur bahwa kesetaraan gender bukanlah nilai Barat yang mengikis budaya, melainkan semangat yang selaras dengan keadilan dan kelestarian budaya itu sendiri. *Key* (nada/semangat) yang digunakannya pun lentur, terkadang tegas dan argumentatif di parlemen, tetapi penuh *tepo seliro* (tenggang rasa) dan kebijaksanaan ketika berbicara dalam konteks budaya.

Konsistensinya dalam mengangkat isu PUG dan RUU Keistimewaan DIY menunjukkan pemahaman mendalam tentang *Instrumentality* (saluran dan bentuk tuturan) yang tepat. Ia tidak hanya menggunakan pidato dan media modern, tetapi juga

menjadikan produk hukum seperti UU Keistimewaan sebagai *instrumentality* untuk mengukuhkan nilai-nilai inklusivitas secara struktural. Dalam *Norms* (norma interaksi), ia menghormati norma budaya Jawa yang hierarkis tanpa terperangkap di dalamnya. Ia memanfaatkan posisinya dalam hierarki tersebut untuk membuka ruang dialog, mengubah norma dari dalam tanpa menimbulkan gejolak penolakan yang besar. Akhirnya, semua ini terjadi dalam *Genre* (jenis tuturan) yang beragam, mulai dari genre pidato politik, diskusi panel, hingga genre tutur tradisional Jawa dan tulisan akademis.

Dengan demikian, kepemimpinan komunikatif GKR Hemas adalah sebuah etnografi hidup, sebuah praktik yang tidak hanya mempelajari, tetapi secara aktif dan sadar membentuk *ways of speaking* (cara-cara bertutur) dalam komunitas-komunitas yang dijalaninya. Ia membuktikan bahwa perubahan sosial, khususnya dalam konteks budaya yang kuat, tidak hanya dicapai melalui konfrontasi, tetapi melalui kemampuan strategis untuk *berbicara dalam banyak bahasa budaya* sekaligus, menjadikan budaya itu sendiri sebagai medium paling *powerful* untuk transformasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, studi ini menyimpulkan bahwa: **Pertama**, kepemimpinan komunikatif GKR Hemas menunjukkan bahwa ketahanan politik dibangun melalui kompetensi komunikasi strategis, yang mentransformasi modal kultural menjadi sosial berkelanjutan. Kemampuan beliau kembali ke pucuk Pimpinan DPD RI setelah periode jeda membuktikan efektivitas komunikasi beliau dalam membangun legitimasi yang didasarkan rekam jejak nyata, khususnya pemberdayaan perempuan dan disabilitas, yang sejalan dengan prinsip *no one left behind* dalam SDGs.

Kedua, kepemimpinan komunikatif GKR Hemas berhasil mentransformasi representasi gender dari sekedar pemenuhan kuota 30% menuju tujuan yang lebih substantif. Melalui inisiatif seperti Kaukus Perempuan Parlemen dan advokasi *gender budgeting*, beliau menciptakan infrastruktur kelembagaan yang mendukung partisipasi politik perempuan, merupakan implementasi konkret dari SDGs poin 5 (Kesetaraan Gender) dan poin 16 (Kelembagaan yang Kuat).

Secara praktis, kesimpulan penelitian ini mengarah kepada beberapa rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat representasi dan kepemimpinan perempuan di Indonesia, sebagai berikut:

1) Pentingnya Pendidikan Politik Berbasis Gender dan Komunikasi Strategis. Rekomendasi: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bersama partai politik dan lembaga pelatihan, perlu mengembangkan kurikulum pelatihan politik tidak hanya berfokus kepada kemampuan teknis (seperti kampanye dan manajemen keuangan), tetapi juga membangun kompetensi komunikasi strategis berbasis kearifan lokal. Tujuan: Menciptakan calon pemimpin perempuan yang tidak hanya memenuhi kuota, tetapi memiliki kapasitas substantif untuk mempengaruhi kebijakan dan mendekonstruksi wacana patriarkal.

2) Penguatan Kelembagaan *Support System* bagi Perempuan di Politik. Rekomendasi: Keberhasilan Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI pimpinan GKR Hemas perlu menjadi model yang diduplikasikan dan dilestarikan pada DPR RI, DPD RI dan DPRD di semua tingkat agar dapat mendesain dan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi kaukus sejenis. Tujuan: Mencegah isolasi politik dan menciptakan kekuatan kolektif yang mampu menggeser kebijakan dari dalam lembaga legislatif.

3) Revisi Regulasi untuk Memperkuat Posisi dan Rekrutmen Perempuan. Rekomendasi: Memperkuat DPD RI, perlunya evaluasi dan revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Susunan Lembaga Negara) untuk memperkuat fungsi legislatif DPD RI, khususnya dalam pengawasan implementasi otonomi daerah dan kebijakan yang berdampak pada kesetaraan gender. Tujuan: Menciptakan ekosistem regulasi yang tidak hanya memastikan akses (kuota) tetapi juga memfasilitasi kinerja dan kesuksesan bagi perempuan di dunia politik.

4) Reformasi Sistem Rekrutmen Politik. Rekomendasi: Partai politik perlu didorong (melalui revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik) untuk menerapkan mekanisme *zebra list* atau sistem suksesi yang memastikan keterwakilan Perempuan di posisi calon terpilih, bukan hanya nomor urut di bawah. Sistem kaderisasi partai juga harus memasukkan program khusus untuk membangun *cultural capital* dan jaringan bagi perempuan. Tujuan: Untuk menciptakan *pipeline* kepemimpinan

perempuan yang berkelanjutan dan memastikan akses ke posisi strategis.

REFERENSI

- [1] Kontu F, Pesak S. Kuota 30% Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia. *Papsel: Journal of Humanities and Policy*. 2025;2(1):64–73.
- [2] Sudarsono AB. Politik Perempuan Perempuan Politik: Perjalanan Politik Perempuan di Indonesia. Jakarta: Kreasi Cindika Pustaka; 2024.
- [3] IPU.org. Women in Power in 2023: New Data Shows Progress but Wide Regional Gaps. March 7, 2023. 2023.
- [4] Dardias B. Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit Dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 2016;42(1):31–49.
- [5] Safitri I. Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana “Raja Perempuan.” *Indonesian Historical Studies*. 2019;3(1):44–57.
- [6] Wulandari MP, Zahro MN, Sujoko A. Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa). *Jurnal Interaktif*. 2022;14(1):26–49.
- [7] Putri IA. Kuasa Politik Perempuan. Depok: Raja Grafinda Persada; 2023.
- [8] Andriyan DN. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. 2018;1(1):79–94.
- [9] Salman A, Efriza. Peran Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 Dalam Menyerap Aspirasi Warga DKI Jakarta. *Jurnal Adhikari*. 2022;1(3):118–30.
- [10] Syamsi I, Prabowo AA. GKR Hemas: Ratu di Hati Rakyat. Jakarta: Kompas; 2012.
- [11] Baharudin B. Perempuan Dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 2024;7(2):65–72.
- [12] Saputra I, Asih NW. Kepemimpinan Perempuan dan Pilkada Serentak. *Aristo*. 2017;5(1):141–62.
- [13] Elimanafe FA, Manafe YD, Balalembang CJ, Jelahun FE. Kajian Etnografi Komunikasi Dell Hymes Terhadap Tradisi Tu’u Belis. *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*. 2023;3(2):309–25.

- [14] Winarty S. Studi Etnografi Komunikasi Dell Hymes Pada Gaya Komunikasi Komunitas Rohani Sel Santunnn. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. 2025;7(1):1–8.
- [15] Creswell JW. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2017.
- [16] Ahmad ZK, Hanum F. Kesetaraan Gender Pada Pembagian Tugas Dalem Abdi Punakawan. Jurnal Pendidikan Sosiologi. 2019;2(1):2–21.
- [17] dpd.go.id. Pimpinan DPD RI [Internet]. 2024. Tersedia pada: <https://www.dpd.go.id/anggota/anggota/alkel?tag=PIMPINAN+DPD&id=462&year=2028>
- [18] Arjani NL. Kesetaraan Gender di Bidang Politik: Antara Harapan dan Realita. Sunari Penjor: Journal of Anthropology. 2021;5(1):1–6.
- [19] Ambarita RS. Pesan Kesetaraan Gender Dalam Pidato Emma Watson di PBB Tahun 2014. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi. 2020;4(1):1–11.